



Available online at **HISTORIA**; Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah
Journal homepage: <https://ejournal.upi.edu/index.php/historia>



RESEARCH ARTICLE

HEGEMONI PENDIDIKAN KOLONIAL DAN MUNCULNYA AMTENAR BUMIPUTRA DI JAWA (1900–1932)

Mohammad Masrudin Firdiyansyah

Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada

Correspondence: masrudin049@gmail.com

To cite this article: : Firdiyansyah, M. M.(2024). Hegemoni pendidikan kolonial dan munculnya amtenar bumiputra di jawa (1900–1932). *HISTORIA: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah*, 7(2), 173-184. <https://doi.org/10.17509/historia.v7i2.73863>.

Naskah diterima : 19 Agustus 2024, Naskah direvisi : 30 Agustus 2024, Naskah disetujui : 30 Oktober 2024

Abstract

Colonial education not only produced educated individuals who openly resisted the colonial government but also those who chose to become civil servants (*ambtenaar*). This study aims to examine the forms of educational hegemony during the colonial period and its influence on the emergence of Bumiputra *ambtenaar* in Java. Employing historical methods, this research utilizes secondary sources such as scholarly articles, theses, and books, as well as primary sources like the newspapers *De Indische Courant*, *Sin Jit Po*, and others. The findings reveal that hegemonic aspects in education manifested through the inculcation of values aligned with colonial interests, such as work skills, loyalty, and a Western-oriented education system, while avoiding elements that might challenge the status quo. This hegemonic education led educated Bumiputra to prefer becoming *ambtenaar* rather than openly resisting the colonial government. However, *ambtenaar* did not always remain servants of the colonial administration. Mockery, wage discrimination, and exposure to anti-colonial ideologies eventually led some *ambtenaar* to turn against the colonial system. Thus, colonial education did not solely produce two static actors—those who complied or those who resisted—but also created a dynamic group whose behavior could shift depending on specific situations and conditions.

Keywords: *Ambtenaar*; Discrimination; Education; Hegemony.

Abstrak

Pendidikan kolonial tidak hanya menghasilkan orang-orang terdidik yang secara terang-terangan melawan pemerintah kolonial tapi juga orang-orang yang memilih menjadi pegawai negeri (amtenar). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk hegemoni pendidikan pada masa kolonial dan pengaruhnya terhadap kemunculan amtenar Bumiputra di Jawa. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan memanfaatkan sumber sekunder seperti artikel ilmiah, tugas akhir, dan buku, serta sumber primer seperti koran *De Indische Courant*, *Sin Jit Po*, dan lain-lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek hegemonik dalam pendidikan termanifestasi melalui penanaman nilai-nilai yang sejalan dengan kepentingan kolonial, seperti kecakapan kerja, loyalitas, dan sistem pendidikan yang berorientasi Barat, sambil menghindari elemen-elemen yang berpotensi mengancam status quo. Pendidikan yang hegemonik itu membuat kaum terdidik Bumiputra lebih memilih menjadi amtenar daripada secara terang-terangan melawan pemerintah kolonial. Namun tidak selamanya para amtenar itu menjadi pelayan pemerintah kolonial. Cemoohan, diskriminasi gaji, dan persentuhan dengan ideologi anti-kolonialisme membuat para amtenar ini berbalik arah melawan sistem kolonialisme. Dengan demikian, pendidikan kolonial tidak hanya melahirkan dua aktor yang sifatnya statis—kelompok yang patuh atau pembangkang—tetapi juga menciptakan kelompok yang dinamis, yang perilakunya dapat berubah bergantung pada situasi dan kondisi tertentu.

Kata Kunci: Amtenar; Diskriminasi; Hegemoni; Pendidikan.

HISTORIA: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah, p-issn:2620-4789 | e-issn:2615-7993

PENDAHULUAN

Pada akhir abad ke-19, muncul cara pandang baru dalam melihat posisi penduduk bumiputra di tengah eksploitasi ekonomi kolonial. Para tokoh sosialis Belanda melayangkan kritik keras terhadap kebijakan ekonomi pemerintah Hindia Belanda yang dianggap merugikan penduduk Bumiputra, salah satu tokohnya adalah Van Deventer. Dia mengemukakan bahwa Belanda memiliki utang budi kepada penduduk Bumiputra. Pemerintah Hindia Belanda harus membalas itu dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di negara jajahan (Djoened Poesponegoro & Notosusanto, 2019, hlm. 22). Desakan itu kemudian membuat Ratu Wilhelmina pada tahun 1901 menyatakan bahwa, pemerintah Hindia Belanda akan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat jajahan dengan memperbaiki tiga hal utama yaitu irigasi, emigrasi, dan edukasi.

Tidak dapat dipungkiri kebijakan balas budi itu membawa pengaruh besar terhadap transformasi sosial di Hindia-Belanda. Banyak tokoh elite politik baru yang muncul, terutama disebabkan oleh adanya akses pendidikan yang baik. Sukarno, Syahrir, Hatta, dan Ki Hajar, merupakan beberapa contoh elite politik itu. Berkat pendidikan yang diperoleh, mereka semakin sadar apa itu penindasan dan pentingnya mencapai kemerdekaan.

Namun, akses pendidikan yang baik tidak hanya melahirkan elite politik pejuang kemerdekaan, tetapi juga elite fungsional (terminologi Robert Van Niel) yang ikut melebur dalam struktur ekonomi kolonial – dalam terminologi Gramsci-an disebut sebagai intelektual tradisional. Elite fungsional atau intelektual tradisional itu salah satunya adalah amtenar yang memiliki sinonim pamong praja, priayi, atau menak (Bella Astari Patta, 2023, hlm. 2).

Munculnya kaum terpelajar yang awalnya memilih menjadi amtenar daripada pejuang kemerdekaan disebabkan pendidikan digunakan oleh pemerintah kolonial sebagai instrumen hegemonik untuk menanamkan norma-norma yang dapat melanggengkan status quo, sehingga pendidikan lebih ditujukan untuk memproduksi aparatus kolonial yang dapat memperkuat penguasaan orang Belanda atas Bumiputra daripada pelajar Bumiputra yang sadar akan politik dan ketidakadilan. Sebab pendidikan yang hegemonik itu, cara siswa Bumiputra dalam berpikir dan bertindak terpengaruh oleh kepentingan penguasa (Dawson, 1982, hlm. 150 & 157).

Dengan demikian, upaya mempertahankan kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial tidak hanya melalui paksaan, tetapi juga melalui proses hegemonik, yakni cara-cara yang lebih halus, termasuk pengaruh kultural, ideologi, dan institusi sosial seperti pendidikan, yang membuat dominasi kolonial diterima secara sukarela (Giuseppe Vacca, 2021).

Sayangnya, kehadiran elite fungsional atau amtenar yang terhegemoni ini kurang disorot. Peneliti lain lebih tertarik untuk menyoroti resistensi yang dilakukan oleh elite politik. Ini bisa dilihat dari banyaknya kajian-kajian tentang munculnya perlawanan tokoh Bumiputra yang terdidik kepada pemerintah kolonial. Padahal, respons terhadap pendidikan kolonial itu ada dua macam, resistensi dan reproduksi (Suwignyo, 2019, hlm. 17). Justru respons kedua inilah yang lebih alamiah.

Melalui pendidikan, manusia pada umumnya ingin memperoleh keamanan finansial, terutama dengan bekerja di sektor pemerintahan. Berdasarkan temuan Adinda Puspita Ningrum dkk. (2023) misalnya, banyak mahasiswa yang tertarik menjadi pegawai negeri karena memandang pegawai negeri sebagai pekerjaan yang bergengsi. Mahasiswa menilainya sebagai simbol keberhasilan dan stabilitas ekonomi. Hal yang sama juga diinginkan oleh penduduk Bumiputra pada periode kolonial. Penduduk Bumiputra yang memiliki kewenangan dan kekayaan lebih pada awal abad ke-20 meminta pemerintah Hindia-Belanda menyediakan sekolah berbahasa Belanda untuk anak mereka. Harapannya, anak mereka bisa menempati posisi penting dalam struktur ekonomi kolonial di masa yang akan datang (Algemeen Handelsblad, 1911b).

Peneliti yang sudah mengkaji kemunculan amtenar Bumiputra adalah Heather Sutherland (1983). Namun, Sutherland hanya melihat kemunculan amtenar dari pendidikan modern dan jalinan patron klien antara orang Eropa dan bangsawan Bumiputra. Sutherland tidak menjelaskan apakah pendidikan yang diberikan kepada penduduk Bumiputra itu hegemonik atau tidak, apakah pendidikan yang hegemonik itu berpengaruh terhadap munculnya para amtenar Bumiputra juga tidak dijelaskan oleh Sutherland. Selain itu, Sutherland tidak menjelaskan bagaimana respons amtenar Bumiputra ketika mendapatkan diskriminasi gaji dan ejekan dari orang Eropa. Peneliti lain yang mengkaji pendidikan para amtenar dan bangsawan seperti Indah (2013) dan Herman (2020) juga tidak menjelaskan hal itu. Peneliti yang menyinggung diskriminasi yang dialami oleh amtenar Bumiputra adalah Bella Astari Patta (2023). Namun Patta tidak menjelaskan secara lebih spesifik mengenai respons amtenar Bumiputra terhadap diskriminasi itu. Selain itu Patta lebih fokus kepada amtenar di Makassar, sedangkan penelitian ini lebih fokus di Jawa.

Dari celah tersebut, penelitian ini akan fokus mengkaji bagaimana bentuk hegemoni pendidikan kolonial dan bagaimana pengaruh hal tersebut terhadap munculnya amtenar Bumiputra di Jawa. Selain itu, respons amtenar Bumiputra terhadap cemoohan dan diskriminasi gaji juga akan dibahas dalam penelitian ini. Namun sebelum membahas rumusan masalah kunci itu, akan dijelaskan

terlebih dahulu tentang kemunculan sekolah-sekolah berbahasa Belanda agar pemahaman mengenai pentingnya sekolah-sekolah bahasa Belanda sebagai pintu masuk ke sektor-sektor strategis, termasuk pegawai pemerintahan, bisa dipahami dengan baik. Amtenar yang dimaksud di sini adalah seluruh orang-orang yang menjadi pegawai pemerintah (Bella Astari Patta, 2023, hlm. 2; Sutherland, 1983, hlm. 22), tidak dikhususkan untuk menyebut pegawai pemerintah yang punya jabatan atau kewenangan besar seperti Bupati sebagaimana yang umum disoroti dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Meskipun penelitian ini fokus di Jawa tapi hal-hal yang bersifat umum juga disinggung dalam penelitian ini, terutama mengenai jumlah amtenar Bumiputra di Hindia Belanda.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang terdiri dari heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Sumber yang digunakan tidak hanya sumber sekunder yang ada di buku maupun di jurnal melainkan juga sumber primer yang terbit pada saat peristiwa terjadi. Mayoritas sumber primer yang digunakan berbahasa Belanda, seperti koran *De Indische Courant*, *Bataviaasch Nieuwsblad*, *De Nieuwe Courant*, *De Preanger-bode*, *Algemeen Handelsblad*, dan lain sebagainya. Penggunaan koran-koran berbahasa Belanda itu untuk mengetahui bagaimana pandangan orang Belanda terhadap pendidikan yang ditujukan untuk orang Bumiputra serta bagaimana orang Belanda menyikapi munculnya kelompok terdidik Bumiputra. Koran lokal seperti *Sin Jit Po* juga digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui sudut pandang orang non-Eropa terhadap pendidikan kolonial. Meskipun penelitian ini berfokus pada Jawa, sumber sejarah yang memuat data jumlah amtenar secara spesifik di Jawa tidak ditemukan. Oleh karena itu, data jumlah amtenar Bumiputra di Hindia Belanda digunakan sebagai gambaran umum. Hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa di Jawa juga terdapat banyak amtenar Bumiputra yang bekerja sebagai pegawai negeri, sejalan dengan banyaknya sekolah di wilayah ini yang membuka peluang bagi penduduk Jawa menjadi amtenar. Sumber-sumber tersebut kemudian dikritik tentang keaslian dan keabsahan informasinya. Dari situ kemudian ditafsirkan dan ditulis dalam bentuk historiografi yang runtut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sekolah Berbahasa Belanda sebagai Pintu Masuk Amtenar

Selama proses pendirian sekolah untuk Bumiputra, terdapat perbedaan pendapat tentang siapa yang sebaiknya

diberikan akses pendidikan. Kelompok pertama, Snouck Hurgronje dan J. H. Abendanon, menyatakan sebaiknya pendidikan diberikan kepada kaum bangsawan dengan menggunakan bahasa Belanda, agar mereka nantinya dapat masuk di birokrasi kolonial dan menjadi kelompok yang kooperatif terhadap pemerintah. Dengan sikap kooperatif itu, diharapkan nantinya penduduk Bumiputra lain akan mengikuti. Kelompok kedua, Indenburg dan van Heutsz, menyatakan, tidak begitu, harusnya pendidikan juga diberikan kepada masyarakat Bumiputra secara keseluruhan dengan menggunakan bahasa daerah. Dari kedua pandangan tersebut, pendapat yang pertama diterapkan lebih dulu, sementara pendapat yang kedua diterapkan agak belakangan (Ricklefs, 2008, hlm. 195). Jika Abendanon fokus terhadap pendidikan yang elitis, van Heutsz tidak demikian. Di saat menjadi gubernur jenderal pada tahun 1904-1909, van Heutsz lebih memfokuskan perhatiannya kepada sekolah untuk masyarakat luas dengan mendirikan sekolah berbasis teknik dan kejuruan di berbagai daerah (Ricklefs, 2008, hlm. 195-196).

Menurut Sartono Kartodirdjo, pendidikan di Hindia-Belanda diklasifikasikan menjadi empat kategori: sekolah untuk penduduk Eropa yang sepenuhnya memakai model pengajaran seperti di Belanda; sekolah untuk penduduk bumiputra yang menggunakan pengantar bahasa Belanda; sekolah untuk penduduk bumiputra yang menggunakan pengantar bahasa daerah; sekolah yang sepenuhnya memakai sistem pengajaran bumiputra (Kartodirdjo, 2018, hlm. 85).

Kedudukan sekolah dari tipe 1 dan 2 sangat strategis daripada sekolah tipe 3 dan 4. Dikarenakan menggunakan bahasa pengantar Belanda, lulusan dari sekolah tipe 1 dan 2 mempunyai kemampuan berbahasa Belanda yang baik. Dengan begitu, lulusan sekolah tersebut mampu menempati posisi strategis dalam berbagai sektor yang menggunakan bahasa Belanda. Posisi-posisi itu tidak hanya menghasilkan pendapatan yang besar tapi juga lebih berstatus. Sekolah tipe ke-3 dan ke-4 masih kalah prestise daripada sekolah tipe ke-1 dan ke-2. Lulusan sekolah tipe ke-3 dan ke-4 tidak bisa bekerja pada sektor yang memerlukan kemampuan bahasa Belanda (Kartodirdjo, 2018, hlm. 86).

Dikarenakan prestise yang dimiliki, penduduk Bumiputra kemudian meminta kepada pemerintah Hindia Belanda untuk memberikan akses pendidikan kepada anak-anak mereka ke sekolah yang menggunakan bahasa Belanda. Penduduk Bumiputra yang menginginkan itu adalah kaum bangsawan dan orang-orang kaya (Koloniaal tijdschrift, 1919). Mereka menginginkan anaknya terdidik di sekolah Eropa, karena yakin itu akan membuat anaknya lebih terjamin kehidupannya (Algemeen Handelsblad 1911b). Salah satu contoh dibukannya sekolah jenis ini di tingkat sekolah dasar adalah *Hollandsch Inlandsche school*

(HIS), yang sebelumnya merupakan sekolah pribumi kelas satu (*Eerste Klasse School*). Setelah sekolah kelas satu diubah menjadi HIS pada tahun 1914, penduduk Bumiputra menyukai sekolah ini, terutama priayi tingkat rendah. Mereka sangat antusias mendaftarkan anaknya ke sekolah HIS. Terkadang fasilitas sekolah tidak mampu mengimbangi jumlah pendaftar yang ada (Koloniala tijdschrift, 1919). Kondisi itu berbeda dengan saat masih berstatus sebagai sekolah kelas satu, yang mana bangsawan dan priayi tinggi tidak begitu tertarik menyekolahkan anaknya di sekolah ini karena awalnya – sampai tahun 1912 – tidak menggunakan bahasa belanda dan tidak ada jenjang pendidikan lanjutan yang dapat dimasuki oleh alumninya (Nasution, 2008, hlm. 54). Bangsawan dan priayi di Sumatra misalnya, lebih tertarik untuk memasukkan anaknya di sekolah swasta yang sepenuhnya menggunakan bahasa Melayu daripada menyekolahkan anaknya di sekolah kelas satu (Herman, 2020, hlm. 39).

Berbeda dengan di Sumatera, bangsawan dan priayi Bumiputra di Jawa, sebelum sekolah kelas satu diubah menjadi HIS, lebih suka menyekolahkan anaknya ke ELS (*Europeesche Lagere School*). Hal ini lantaran sekolah ini menggunakan bahasa Belanda dan lulusannya dapat menempuh studi lanjutan. Bahkan setelah sekolah kelas satu diubah menjadi HIS, bangsawan Bumiputra lebih suka menyekolahkan anaknya ke ELS. Ada tiga penyebab mengapa bangsawan Bumiputra di Jawa lebih suka menyekolahkan anaknya ke ELS daripada HIS. Pertama, ELS merupakan satu-satunya sekolah yang memberikan pelajaran persiapan untuk ujian pegawai rendah. Kedua, jenjang pendidikan yang ditempuh dari ELS sampai sekolah menengah atas atau *Hoogere Burgerschool* (HBS) lebih singkat, yakni 12 tahun. Jika melalui HIS dan kemudian melanjutkan ke *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs* (MULO) dan *Algemeene Middelbare School* (AMS), waktu yang diperlukan adalah 14 tahun. Ketiga, standar pendidikan di ELS setara dengan yang ada di Belanda, sehingga mahasiswa dari lulusan sekolah ini lebih sering menggunakan bahasa Belanda dalam kegiatan sehari-hari (Nasution, 2008, hlm. 53 & 103). ELS sebenarnya ditujukan untuk orang Eropa tapi sejak tahun 1864 anak bangsawan Bumiputra diperbolehkan untuk masuk di sekolah ini. Pada tahun 1891, penduduk Bumiputra yang kaya juga bisa memasukkan anaknya ke sekolah ini. (Latif, 2012, hlm. 98).

Pada awalnya hanya lulusan sekolah ELS yang dapat melanjutkan studi di sekolah pamong Bumiputra atau *Opleidingscholen voor inlandsche ambtenaren* (OSVIA), sekolah kedokteran atau *School Tot Opleiding Van Inlandsche Artsen* (STOVIA), sekolah kehakiman atau *Rechtsschool*, dan sekolah guru atau *Kweekschool* (Djohan Makmur dkk., 1993, hlm. 80). Namun beberapa tahun berikutnya hal tersebut mulai berubah, terutama sejak

dibukannya beberapa jenjang pendidikan baru yakni HIS dan MULO pada tahun 1914. Sekolah di STOVIA misalnya, selain menerima siswa lulusan ELS juga menerima siswa yang lulusan MULO, begitu pula sekolah kedokteran di Surabaya yang bernama *Nederland Indische Artsen School* (NIAS) (Sbk, 2020, hlm. 184). Perubahan itu tidak semuanya berjalan secara cepat ada juga yang berjalan secara gradual. Di OSVIA misalnya, lama waktu studi di sekolah ini pada awalnya adalah lima tahun dengan syarat sudah lulus ELS (Fakhriansyah & Patoni, 2019; Frank, 2005, hlm. 18 & 19). Setelah diubah menjadi MOSFIA (*Middelbare Opleidingschool voor Inlandsche Ambtenaren*) pada tahun 1927, lama waktu studinya menjadi 3 tahun. Ijazah yang diperlukan untuk memasuki sekolah ini juga bisa menggunakan MULO (Suratminto, 2013, hlm. 79). Dengan demikian, MULO menjadi sekolah perantara yang sangat penting untuk meneruskan jenjang pendidikan ke tingkat atas.



Gambar 1. Penduduk Bumiputra yang menempuh sekolah OSVIA di Probolinggo

Sumber : koleksi KITLV nomor 45754

Murid yang tidak berasal dari ELS dan HIS sebenarnya bisa juga memasuki MULO. Hanya saja, mereka harus masuk sekolah peralihan, *Schakel School*. Siswa dari sekolah desa misalnya, harus menempuh sekolah peralihan ini dengan durasi studi sekitar lima tahun (Yudi Agung Franata dkk., 2024, hlm. 294). Namun tidak banyak yang berhasil memanfaatkan sekolah peralihan itu. Hal ini lantaran orang yang masuk sekolah desa mayoritas dari kelas bawah sedangkan biaya yang dikeluarkan untuk bisa mengikuti jenjang pendidikan di sekolah peralihan cukup mahal. Selain itu, siswa dari sekolah desa kesulitan untuk mengikuti pelajaran di sekolah peralihan karena pendidikan di sekolah desa bersifat sangat sederhana (Emerson, 1946, hlm. 294). Oleh sebab itu siswa yang bisa melanjutkan pendidikan ke MULO mayoritas adalah kelas menengah, yang sebelumnya telah menempuh pendidikan di HIS dan ELS. Secara kuantitatif yang paling banyak masuk MULO adalah lulusan HIS karena siswa dari ELS lebih tertarik untuk langsung melanjutkan ke HBS (Nasution, 2008, hlm. 102).

MULO sendiri lebih terbuka untuk penduduk Bumiputra daripada HBS. Penduduk Bumiputra yang dapat menempuh sekolah HBS adalah yang memiliki status sosial tinggi. Sementara MULO bisa dimasuki oleh penduduk Bumiputra dengan status sosial yang lebih rendah (Indah dkk., 2013; Marudut Bernadtua Simanjuntak, 2022, hlm. 103). Lama pengajaran di MULO adalah 3 tahun, sementara lama pengajaran di HBS adalah 5 tahun. Lama pengajaran itu berpengaruh terhadap kualifikasi lulusan sekolah itu. Siswa yang lulus dari HBS bisa langsung melanjutkan studi di perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi di Belanda karena kurikulum yang ada di HBS setara dengan sekolah menengah atas yang ada di Belanda. Hal itu berbeda dengan lulusan MULO. Lulusan MULO harus menempuh studi lanjutan terlebih dahulu di AMS, sebelum nantinya masuk ke perguruan tinggi (Esa Susanti Putri, 2018, hlm. 4; Wibowo, 2018, hlm. 103). Sederhananya, MULO setingkat dengan sekolah menengah pertama sekarang, sementara HBS setingkat dengan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas.

Setelah beberapa perguruan tinggi dibuka di Hindia Belanda, siswa yang lulus dari sekolah menengah atas tidak harus melanjutkan studi di Belanda. Mereka bisa melanjutkan studi di perguruan tinggi kedokteran *Geneeskundige Hogeschool* (GH) di Batavia, sekolah tinggi hukum, *Recht Hooge School* (RHS), yang juga di Batavia, dan sekolah tinggi teknik *Technische Hoogeschool* (THS) di Bandung (Novriyanto dkk., 2022, hlm. 89; Yudi Agung Franata dkk., 2024, hlm. 295).

Untuk menjadi amtenar pemerintah, sebenarnya tidak memerlukan ijazah pendidikan sampai tingkat perguruan tinggi. Ijazah dari AMS, HBS, MULO, ELS, dan HIS saja sudah cukup. Namun semakin tinggi kualifikasi pendidikan posisi yang didapat dalam birokrasi pemerintahan juga semakin baik. Artinya, orang yang memiliki ijazah ELS dan HIS hanya bisa menjadi amtenar atau pegawai tingkat bawah (Nasution, 2008, hlm. 94 & 11.). Berbagai macam sekolah itu sebagaimana yang disebut John Legge, memberikan peluang yang besar kepada alumninya untuk menempati posisi strategis dalam pemerintah (Legge, 1993, hlm. 31 & 33).

Hegemoni Pendidikan Kolonial dan Munculnya Amtenar Bumiputra

Pendidikan yang diberikan di sekolah tidak bebas nilai. Sekolah yang merupakan tempat berlangsungnya pendidikan adalah subsistem dari kekuasaan yang lebih besar, dalam hal ini adalah pemerintah kolonial. Dengan demikian, pemerintah kolonial menentukan arah dan hakikat pendidikan yang berlangsung di sekolah (Suwignyo, 2019, hlm. ix).

Pemerintah kolonial sendiri melihat bahwa pendidikan merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mempertahankan kekuasaan di wilayah koloni (Thang dkk., 2024, hlm. 148). Oleh sebab itu, pemerintah menggunakan pendidikan untuk menciptakan tenaga kerja dan amtenar yang murah sekaligus patuh terhadap pemerintah, yang mana hal tersebut dapat digunakan dalam memperkuat cengkeraman pemerintah kolonial atas wilayah koloni (Djohan Makmur dkk., 1993, hlm. 73).

Tujuan tersebut didasari oleh kesadaran bahwa jumlah orang Eropa yang sedikit tidak akan mampu mempertahankan kekuasaan di wilayah koloni yang begitu luas tanpa melibatkan Bumiputra sebagai pejabat yang berpihak pada pemerintah kolonial. Dalam arti tertentu, pemerintah mengajak Bumiputra untuk menikmati dan mendapatkan keuntungan dari sistem kolonialisme (Gouda, 2007, hlm. 114). Dengan cara ini, lulusan sekolah-sekolah tersebut diarahkan untuk menerima status quo kolonial dan mendukung sistem pemerintahan yang ada, daripada mempertanyakan atau menantang kekuasaan Belanda (Suwignyo, 2019, hlm. 114). Manifestasi yang paling jelas dari hal tersebut adalah dengan pendirian sekolah raja atau *Hoofdschool*, yang pada tahun 1900 berubah menjadi OSVIA.

Melalui sekolah ini, pemerintah berniat menjadikan penduduk Bumiputra sebagai kelompok yang patuh sekaligus pemegang posisi-posisi krusial dalam pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan sesama penduduk Bumiputra. Harapannya, kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial tidak akan dianggap sebagai kesalahan orang Eropa melainkan kesalahan orang Bumiputra itu sendiri (Christiaan Lambert Maria Penders, 1968, hlm. 110–111).

Sekolah sebagai arena untuk membentuk amtenar yang patuh tidak hanya di OSVIA, tapi juga di sekolah yang lain, termasuk di sekolah hukum, *Rechtsschool*. Di sekolah ini, meskipun siswa diajari menjadi seorang yang kritis dan independen tapi juga ditanamkan kesadaran kecintaan terhadap pemerintah kolonial. Para ahli hukum diharapkan dapat menjadi perwakilan negara yang menjelaskan dan menerapkan hukum kolonial. Dari situ kemudian diharapkan kepercayaan publik akan hukum kolonial meningkat karena hukum kolonial disampaikan dan diterapkan oleh sesama orang Bumiputra yang bisa berbahasa lokal (Djalins, 2013, hlm. 137).

Untuk membentuk kelayakan, pemerintah sangat berhati-hati dalam memberikan mata pelajaran, terutama mata pelajaran sejarah Eropa. Hal itu lantaran sejarah mengenai Revolusi Prancis ditakutkan dapat menjadi inspirasi penduduk Bumiputra untuk melakukan perlawanan terhadap status quo kolonial. Oleh sebab itu mata pelajaran sejarah hanya diberikan di sekolah-sekolah

Eropa. Sekolah untuk Bumiputra yang menggunakan bahasa Belanda seperti HIS tidak diberikan mata pelajaran sejarah pada tahun 1915 (Nasution, 2008, hlm. 114; Suratminto, 2013, hlm. 83).

Pembelajaran sejarah mengenai Revolusi Prancis dan perlawanan Belanda terhadap Spanyol di sekolah-sekolah Eropa disandingkan dengan perlawanan Diponegoro terhadap pemerintah kolonial. Hanya saja, narasi itu dikemas dengan cara yang berbeda. Orang Eropa yang melakukan perlawanan terhadap Spanyol dianggap sebagai pahlawan, sedangkan Diponegoro dianggap sebagai pemberontak yang mengacaukan ketenteraman sosial (Suwignyo, 2019, hlm. 115). Hal ini dapat dilihat sebagai upaya untuk menanamkan kesadaran mematuhi hukum-hukum kolonial sekaligus menanamkan rasa loyalitas terhadap pemerintah kolonial.

Penanaman rasa loyalitas terhadap pemerintah kolonial juga terlihat dalam pemberian pendidikan yang menanamkan rasa kerakyatan. Dalam konteks ini, pemerintah kolonial memberikan pendidikan agar penduduk Bumiputra merasa bahwa orang Belanda adalah pemimpinnya, dan bahwa Hindia-Belanda dan Belanda adalah satu kesatuan, bukan dua entitas yang berdiri sendiri (Suwignyo, 2019, hlm. 113 & 116). Pendidikan yang ditujukan untuk menciptakan kaum terdidik yang patuh dan loyal sudah tampak dalam pemberian pendidikan yang segregatif, di mana pendidikan calon amtenar difokuskan pada kaum bangsawan dan pejabat pemerintah yang sebelumnya telah menunjukkan kesetiaan kepada pemerintah kolonial (Djalins, 2013, hlm. 131).

Para anak bangsawan dan pejabat kolonial dididik untuk menjadi penerus ayahnya, yaitu seseorang yang bekerja untuk pemerintah kolonial. Mereka dilatih untuk dapat mengelola administrasi dengan baik dan membantu pemerintah mengatasi masalah di bidang kesehatan, pertanian, teknik, dan sebagainya (Fakhriansyah & Patoni, 2019; Suratminto, 2013, hlm. 83). Oleh sebab itu, sekolah untuk menampung anak Bangsawan dan priayi itu diberikan pengetahuan tentang kebelandaan, terutama bahasa Belanda (Thang dkk., 2024, hlm. 442). Hal tersebut agar kelak mereka dapat melakukan tugasnya sebagai amtenar dengan baik.

Namun pengajaran bahasa Belanda dan model sekolah Eropa tidak hanya ditujukan untuk membentuk siswa yang paham akan bahasa Belanda tapi juga untuk membentuk siswa yang memiliki cara berpikir dan perilaku seperti orang Eropa (Suwignyo, 2013, hlm. 482). Tujuan ini berhasil, sehingga beberapa siswa mulai merasa lebih superior saat meniru orang Eropa dalam berbusana, berkesenian, dan berbahasa. Bahkan, mereka menganggap penggunaan bahasa daerah atau bahasa Indonesia sebagai suatu kemunduran (*Algemeen Handelsblad*, 1923). Dengan

demikian, ada juga penduduk Bumiputra yang ketika mempelajari bahasa bangsa penjajah, malah merasa menjadi inferior terhadap bahasanya sendiri (Lourdes Diaz Soto & Haroon Kharem, 2006, hlm. 26).

Cara lain untuk membentuk Bumiputra agar memiliki cara berpikir seperti orang Eropa adalah dengan mengajarkan pengetahuan objektif dan modern yang bersumber dari tradisi keilmuan Barat. Hal ini membawa pada penghancuran keyakinan lokal yang dianggap sebagai takhayul, tertinggal, dan tidak ilmiah. Pendidikan kolonial “menculik” anak priayi dan bangsawan dari kehidupan keluarganya, kemudian memasukkan mereka ke dalam alam pikiran dan budaya Barat yang dianggap superior (Came dkk., t.t., hlm. 2). Hal ini sejalan dengan pandangan Snouck Hurgronje yang mengatakan bahwa anak priayi pribumi harus dipisahkan dari lingkungan keluarganya karena lingkungannya itu dapat menghambat perkembangan moral dan intelektualnya (Sutherland, 1983, hlm. 86).

Inilah bentuk hegemoni dalam pendidikan, yang mana pendidikan tidak hanya ditujukan untuk membentuk keterampilan tapi sekaligus juga membentuk cara berpikir, moral, dan perilaku yang dapat melanggengkan status quo dan kepentingan kolonial, pendidikan yang menginternalisasi pandangan superioritas Barat atas Timur. Namun, selain mengandung unsur hegemonik, pendidikan kolonial juga mengandung unsur dominasi sekaligus. Hegemoni digunakan untuk menanamkan kesadaran dan persetujuan secara sukarela terhadap nilai-nilai kolonial sementara dominasi ditujukan untuk menekan setiap bentuk perlawanan kepada pemerintah kolonial. Kedua hal itu dapat dilihat dari upaya pemerintah kolonial menjauhkan pengajaran dan aktivitas yang dianggap membahayakan status quo (Indah dkk., 2013).

Salah satu bentuk hegemoni yang dilakukan oleh pemerintah kolonial dalam menghindari pengajaran yang membahayakan itu adalah dengan membentuk sistem sekolah yang netral dari moral agama tertentu. Dengan membuat pendidikan yang seolah-olah netral, pemerintah kolonial berusaha agar siswa Bumiputra menginternalisasi nilai-nilai sekuler Barat dan menjauhkan dari keyakinan yang dianggap dapat membahayakan status quo, terutama Islam (Christiaan Lambert Maria Penders, 1968, hlm. 93). Hal seperti itu diungkapkan Agus Salim, tokoh yang sadar bahwa pendidikan kolonial bersifat hegemonik. “Meskipun saya terlahir dalam keluarga muslim yang taat, dan mendapatkan pendidikan agama sejak dari masa kanak-kanak, namun (setelah masuk sekolah Belanda) saya mulai merasa kehilangan iman” (Latif, 2012, hlm. 109). Pemerintah juga merancang pendidikan agama dan pendidikan sekuler Barat secara terpisah agar kedua arus tersebut tidak bersatu dalam gerakan nasionalisme (Lilie Suratminto, 2020).

Pemerintah kolonial memang sebisa mungkin menjauhkan sekolah sebagai tempat persemaian gerakan nasionalisme. Dalam hal ini, unsur dominasi dalam pendidikan kolonial terlihat lebih jelas. Di NIAS misalnya, pihak sekolah beberapa kali membubarkan pertemuan organisasi yang bernama Indonesia Moeda. Murid yang tetap bersikukuh untuk mengikuti Indonesia Moeda diancam dikeluarkan dari NIAS (De Sumatra post, 1933). Kontrol terhadap gerakan nasionalisme tidak hanya untuk para siswa yang berada di Indonesia tapi mahasiswa yang sedang menempuh studi di Belanda. Aktivitas mahasiswa dibatasi, dan yang terlibat dalam Perhimpunan Indonesia diancam dicabut beasiswanya (Djalins, 2013, hlm. 131).

Kontrol yang ketat terhadap gerakan nasionalisme tidak heran membuat siswa sampai ada yang apolitis, seperti yang dijelaskan oleh I.S., lulusan HIS yang kemudian melanjutkan pendidikan di Hollands Inlandse Kweekschool (HIK). “Pada masa Belanda, 90% (murid HIK) apolitis. Ini bukan untuk mengecilkan mereka, tapi kenyataannya memang begitu.....Pernah ada seseorang teman dikeluarkan dari asrama HIK karena dia menyanyikan lagu Indonesia Raya” (Suwignyo, 2019, hlm. 115).

Penciptaan ruang gerak yang terbatas bagi persemaian gerakan nasionalisme di sekolah dan pendidikan yang dilakukan secara terus menerus untuk menciptakan pribadi yang loyal, patuh, dan fokus terhadap karier, membuat beberapa siswa Bumiputra ada yang terhegemoni. Bahkan orang yang terhegemoni itu bisa dikatakan lebih banyak, sebagaimana pernyataan I.S. sebelumnya. Alih-alih melakukan *counter-hegemony*, kelompok pelajar Bumiputra yang terhegemoni justru melebur dalam struktur ekonomi yang telah disediakan oleh pemerintah kolonial. Kelompok terpelajar Bumiputra itu memang tampil sebagai kelompok intelektual baru – yang berwawasan Eropa dan paham bahasa Belanda – tapi sekaligus kelompok yang justru menopang status quo kekuasaan kolonial. Mereka dijadikan pilar untuk menopang kekuasaan kolonial pada tingkatan lokal, hal yang membuat Belanda bisa mengendalikan masyarakat tanpa harus bersentuhan secara langsung di setiap level masyarakat. Mereka juga dijadikan pemerintah sebagai tameng apabila masyarakat tidak puas dengan penjajahan yang dilakukan oleh Belanda (Herman, 2020, hlm. 41; Muhammad Rifa'i, 2020, hlm. 68).

Salah satu tokoh amtenar Bumiputra yang secara terang-terangan menjadi tameng kekuasaan kolonial adalah Raden Adipati Aria Mohammad Moesa Soeria Kartalegawa. Dia pernah menempuh studi di ELS dan HBS. Berkat pendidikan barat yang diperolehnya itu, dia sangat menyukai budaya dan hal-hal terkait Eropa, termasuk makanan Eropa seperti bistik, saus tomat, *macaronischotel*, *erwtensoeep*, dan lain-lain (Pribadi, 2019; Lubis, 1998, hlm. 305). Dia tidak hanya menyukai kebudayaan Eropa,

tetapi juga bersekongkol dengan pihak kolonial untuk mempertahankan status quo. Ketika menjadi anggota Volksraad, Moesa Soeria Kartalegawa secara tegas menolak petisi kemerdekaan yang diajukan oleh Soetardjo. Bahkan setelah periode revolusi, ia lebih mendukung Belanda daripada proklamasi kemerdekaan yang dilakukan oleh Sukarno dan Hatta. Moesa Soeria Kartalegawa justru mendirikan negara Pasundan sebagai bagian yang terpisah dari Republik (Saputra, 2024; Rahman, 2022). Ayah Moesa Soeria Kartalegawa yang bernama R.A.A. Soeria Kartalegawa. R.A.A. Soeria, juga tidak bersimpati pada gerakan nasionalisme. Ayah Moesa ikut terlibat dalam penumpasan gerakan Sarekat Islam di Garut dan membuang Muhammad Sanusi ke Digul (Pribadi, 2019).

Sikap dari Moesa Soeria Kartalegawa dan ayahnya tersebut merupakan hal yang sudah direncanakan oleh pemerintah kolonial. Sebagai bagian dari strategi untuk mempertahankan kekuasaan, pemerintah menaburkan konflik internal di antara penduduk Bumiputra yang masuk dalam birokrasi pemerintahan dengan tokoh Bumiputra yang tergabung dalam gerakan nasionalis (Gouda, 2007, hlm. 121 & 118).

Para amtenar yang dibutuhkan oleh pemerintah kolonial tidak hanya dalam jabatan-jabatan politis seperti yang diberikan oleh keluarga Kartalegawa tapi juga dalam bidang lain yang lebih luas. Bidang lain yang lebih luas ini tidak selamanya mengharuskan para amtenar berhadapan secara *vis a vis* dengan kaum nasionalis, yang penting setia dan tidak berbalik arah melawan pemerintah kolonial. Di Priangan tahun 1909 misalnya, banyak orang-orang Bumiputra yang mahir berbahasa Belanda. Mereka dipekerjakan sebagai pekerja administrasi, juru tulis, mantri dan lain sebagainya. Koran *De Locomotief*, menyebut bahwa tumbuhnya para amtenar disebabkan oleh dibukannya sekolah berbahasa Belanda di daerah Priangan (De locomotief, 1909).

Setelah menempuh pendidikan barat, penduduk Bumiputra yang terhegemoni memandang bekerja di pemerintahan merupakan sebuah prestise tersendiri. Menurut keterangan Snouck Horgonje ada dua orang Bumiputra yang ingin menempuh studi di Belanda bertanya kepadanya, apakah saya nantinya dapat bekerja di sektor pemerintahan ketika sudah lulus (Sumatra-bode, 1911c). Ini menunjukkan bahwa penduduk Bumiputra memang ada yang sengaja menempuh pendidikan di Universitas untuk masuk dalam struktur birokrasi kolonial.

Ketika penggadaan secara masif di buka di Hindia Belanda, banyak penduduk Bumiputra yang tertarik untuk menjadi pekerja di sektor ini. Beberapa di antaranya berhasil diterima, bahkan ada yang berhasil memegang posisi penting sebagai wakil ketua pegadaian dengan gaji 75 gulden per bulan (De nieuwe courant 1914).

Bumiputra yang terpelajar juga mulai berusaha memasuki sektor-sektor lain seperti kedokteran, dan pertanian. Pada tahun 1912, empat dokter Bumiputra diterima sebagai petugas kesehatan di pemerintahan, sementara seperlimanya bekerja sebagai dokter sipil di layanan kesehatan. Peluang yang sama juga diperoleh lulusan pertanian. Mereka berpotensi diangkat menjadi pekerja di departemen pekerjaan umum setelah selesai menempuh proses pendidikan (De nieuwe vorstenlanden 1912).

Penduduk Bumiputra juga banyak yang diterima sebagai guru sekolah negeri. Pada tahun 1912, guru di sekolah khusus Bumiputra yang menggunakan bahasa daerah hampir seluruhnya adalah orang Bumiputra. Bahkan penduduk Bumiputra ada yang sampai menjadi kepala sekolah di sekolah-sekolah berbahasa Belanda, yang di situ ada juga guru-guru Eropa. Dengan demikian, posisi penduduk Bumiputra lebih tinggi daripada guru-guru Eropa yang mengajar di sekolah itu (De standaard 1907b).

Selain itu, banyak juga penduduk Bumiputra yang menjadi hakim di pengadilan negeri Pribumi. Hanya saja mereka tidak bisa menjadi hakim di pengadilan untuk orang Eropa. Penduduk Bumiputra diperbolehkan bekerja di pengadilan Eropa asal bersedia berganti kewarganegaraan (De nieuwe vorstenlanden 1912, Bataviaasch nieuwsblad, 1915).

Dengan mulai banyaknya penduduk Bumiputra yang berhasil menjadi amtenar atau pegawai pemerintah, pada tahun 1911 koran bahasa Belanda, De locomotief, memperkirakan bahwa penduduk Bumiputra di Hindia-Belanda yang berhasil menjadi pegawai pemerintah jumlahnya 26.000 orang (termasuk orang Jawa), lebih banyak daripada orang Eropa yang berjumlah 8.000 orang (De locomotief, 1911d). Pada tahun berikutnya, pertumbuhan orang Bumiputra yang berhasil menjadi pegawai pemerintah semakin besar. Pada tahun 1921, terdapat 128.549 pegawai Bumiputra dan 20.021 pegawai Eropa. Jumlah itu tidak termasuk personel militer (Bataviaasch nieuwsblad, 1921). Namun, meskipun secara kuantitatif amtenar Bumiputra lebih banyak daripada Eropa, jabatan paling atas masih ditempati oleh orang Eropa. Hal itu dapat dilihat dari sedikitnya jumlah amtenar Bumiputra yang mendapatkan gaji di atas f550.

Tabel 1. Jumlah persentase besaran gaji pegawai Bumiputra dan Eropa (tidak termasuk personel militer)

Kategori Gaji	Etnis Pegawai	Jumlah Pegawai
Gaji di bawah f500 per bulan	Eropa	16.447 orang
	Bumiputra	138.407 orang
Gaji f500 atau lebih	Bumiputra	3.574 orang
	Pribumi	141 orang

Sumber : (Bataviaasch nieuwsblad 1921)

Selain itu, Surat Kabar *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie* pada tahun 1930 memberitakan bahwa, jabatan dengan skala gaji B9, 57,4% masih ditempati oleh orang Eropa. Penduduk Bumiputra, termasuk Jawa, baru mendominasi pada jabatan yang lebih rendah (pegawai kelas I dan kelas II). Di Departemen Keuangan (*Departement van Financiën*) misalnya, pegawai yang masuk kelas I dan II 65% adalah orang Bumiputra, di Departemen Dalam Negeri (*Departement van Binnenlands Bestuur*) ada sebanyak 73% pegawai Bumiputra, dan di Departemen pertanian (*Departement van Landbouw*) ada sebanyak 77%. Meskipun Bumiputra mayoritas masih menduduki jabatan kelas I dan II, jumlah itu menandakan bahwa mereka mampu menggantikan jabatan yang sebelumnya ditempati oleh orang Eropa (*Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië*, 1930a).

Cemoohan, Diskriminasi Gaji, dan Respons Amtenar Bumiputra

Amtenar Bumiputra yang bekerja pada struktur ekonomi kolonial yang sudah mapan memang cenderung melestarikan sistem sosial yang ada, tapi tidak serta merta mereka lepas dari perlakuan yang tidak menyenangkan. Amtenar Bumiputra sering mendapatkan ejekan sebagai makhluk inferior padahal mereka merupakan orang yang sudah berhasil mendapatkan ijazah HBS, kedokteran, hukum, atau telah berhasil lulus dari sekolah pegawai negeri.

Alasan orang Eropa yang bekerja di sektor pemerintahan tidak suka terhadap pegawai Bumiputra adalah karena merasa lahan pekerjaan mereka akan mengecil seiring dengan banyaknya penduduk Bumiputra terdidik yang berminat bekerja di sektor pemerintahan. Selain itu, pejabat Eropa juga tidak senang superioritas rasial-kultural mereka terancam oleh orang Bumiputra yang berpendidikan. Pegawai Eropa masih merasa bahwa orang-orang yang memiliki kecakapan intelektual yang baik adalah orang-orang Eropa sementara orang Bumiputra tidak memiliki itu (De Preanger-bode 1913). Oleh sebab itu, pegawai Eropa menolak mengakui bahwa pada abad ke-20 sudah banyak penduduk Bumiputra yang berhasil menjadi orang intelek dan cakap dalam melakukan kegiatan administrasi, sesuatu yang pada abad sebelumnya masih belum menjadi pemandangan umum. Tak jarang, cara komunikasi amtenar Bumiputra kepada orang Eropa yang berbeda dengan cara komunikasi pada abad ke-19 pun dianggap sebagai hal yang tidak sopan dan kurang menghargai keluhuran kultural Eropa (De Indische courant, 1927).

Dambaan orang Eropa untuk diperlakukan sebagai seorang yang lebih tinggi dapat dilihat dari kasus bagaimana seorang Jaksa di Purwakarta diharuskan untuk melakukan

penyembahan terhadap atasannya yang berbangsa Eropa. Jaksa Bumiputra itu diharuskan untuk berjalan dengan berjongkok, duduk di lantai, dan berbicara menggunakan bahasa Jawa kromo kepada atasannya. Bahkan setelah selesai berbicara jaksa Bumiputra itu diharuskan untuk menyatukan kedua tangan mereka sebagai tanda penghormatan dan kepatuhan (van der Meer, 2020, hlm. 77).

Orang Eropa yang tetap bersikukuh menginginkan penduduk Bumiputra untuk berada di dalam hierarki paling rendah justru adalah orang Indo-Eropa (van Niel, 2009, hlm. 65). Sejak dari politik etis, orang Indo-Eropa menolak untuk memberikan akses pendidikan barat yang merata di kalangan Bumiputra. Orang Indo-Eropa berpandangan bahwa pemberian akses pendidikan Eropa kepada Bumiputra dapat merusak peran yang sebelumnya telah diemban orang Bumiputra dan Belanda. Menurut mereka, peran bangsawan Bumiputra adalah memelihara kestabilan di masyarakat setempat dan memelihara hubungan antara yang diperintah dan yang memerintah sedangkan peran orang Eropa adalah memberikan keputusan-keputusan penting dan menyediakan teknologi sebagai landasan kemajuan. Khawatir akan rusaknya pembagian peran yang dianggap menguntungkan itu, orang Indo-Eropa berpendapat bahwa pemberian pendidikan modern kepada penduduk Bumiputra secara masif hanya merupakan tindakan buang-buang anggaran (Sutherland, 1983, hlm. 88).

Setelah penduduk Bumiputra berhasil menjadi amtenar dengan bekal pendidikan yang diperolehnya, orang Indo-Eropa masih merawat kebencian itu. Orang Indo-Eropa terkadang sengaja memberikan instruksi yang kurang jelas kepada pegawai Bumiputra dengan harapan mereka akan melakukan kesalahan. Dengan demikian, mereka bisa mengejek dan menunjukkan bahwa orang Bumiputra tidak dapat melakukan tugas sebaik orang Eropa. Lagi-lagi, ini merupakan cara orang Eropa untuk menunjukkan superioritasnya di atas orang Bumiputra. Praktik seperti itu membuat pegawai Bumiputra tidak bisa mendapatkan kenyamanan dalam bekerja (De Preanger-bode 1913).

Selain mendapatkan perlakuan yang rasis, amtenar Bumiputra juga mendapatkan gaji yang lebih kecil dibandingkan dengan orang Eropa. Gaji orang Eropa yang lebih besar dianggap wajar karena mereka harus meninggalkan kampung halamannya dan menyesuaikan dengan iklim tropis di mana orang Eropa berdarah murni belum terbiasa akan hal itu, sehingga diperlukan daya tawar yang tinggi agar orang Eropa mau bekerja di Hindia Belanda (Anonim, 1932, hlm. 33).

Penduduk Bumiputra yang mendapatkan gaji setara dengan orang Eropa hanyalah yang bersekolah di Belanda (De Preanger-bode, 1912a). Penduduk Bumiputra yang tidak bersekolah di luar negeri mendapatkan gaji maksimal 2/3 dari orang Eropa (Anonim, 1932, hlm. 36). Penduduk

Bumiputra yang berprofesi sebagai kepala stasiun misalnya, hanya mendapatkan 1/3 dari gaji orang Eropa dalam posisi yang sama (Anonim 1918, hlm. 36).

Dikarenakan adanya ketidakpuasan dari para amtenar Bumiputra, pemerintah pada tahun 1913 berupaya menyamakan gaji antara orang Eropa dan Bumiputra, baik yang menempuh pendidikan di Belanda atau di Hindia-Belanda. Namun kebijakan itu tidak berhasil diterapkan secara efektif. Oleh sebab itu pemerintah berusaha membuat kebijakan baru yang lebih komprehensif dalam mengatur persamaan gaji antara orang Eropa dengan Bumiputra (Anonim, 1932, hlm. 40).

Aturan baru itu dikeluarkan pada tahun 1925. Peraturan mengenai kesetaraan gaji antara orang Eropa dan Bumiputra dijelaskan secara lebih komprehensif. Meskipun demikian, aturan baru ini juga terdapat pasal yang menyatakan bahwa gaji harus diberikan berdasarkan standar hidup seseorang, yang mana orang Eropa dianggap memiliki biaya hidup yang lebih besar daripada orang Bumiputra (Anonim, 1932, hlm. 36). Selain itu, aturan gaji baru itu tidak langsung berdampak pada para amtenar Eropa yang sudah mendapatkan gaji sesuai dengan standar sebelumnya. Dengan demikian, aturan yang baru itu tidak membuat ketimpangan gaji antara orang Eropa dan Bumiputra hilang.

Meskipun mendapatkan gaji yang lebih rendah dan ejekan dari orang Eropa, amtenar Bumiputra ada yang tetap bertahan dalam pekerjaannya. Namun tidak semuanya bersikap demikian. Ada yang tidak betah dengan perlakuan rasis dan diskriminatif yang dilakukan oleh orang Eropa. Amtenar Bumiputra lebih memilih keluar dari birokrasi pemerintahan dan pindah bekerja di sektor swasta (De Preanger-bode 1913).

Amtenar Bumiputra bahkan ada yang justru berbalik arah melawan pemerintah kolonial, terutama yang bersentuhan dengan ideologi anti kolonialisme seperti Komunisme. Para amtenar itu terlibat dalam pemberontakan komunis di Jawa tahun 1926 dan di Sumatera tahun 1927. Dari seluruh pemberontak yang telah ditahan, 518 di antaranya adalah pegawai pemerintah. Para tahanan itu juga merupakan lulusan sekolah yang menggunakan pengantar bahasa Belanda, lulusan sekolah HIS berjumlah 67 orang dan ELS 10 orang (van Niel, 2009, hlm. 329-330).

Perlawanan terhadap kolonialisme oleh para amtenar Bumiputra juga hadir dalam bentuk yang lebih halus, yakni menolak perlakuan diskriminatif yang dilakukan oleh orang Eropa dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, Soemarsono, seorang Jaksa yang terdidik di sekolah Eropa, menolak duduk di lantai dan berjalan membungkuk ketika berinteraksi dengan orang Eropa. Soemarsono menolak perlakuan diskriminatif tersebut karena menganggap

bahwa amtenar Bumiputra memiliki kapasitas dan hak yang sama dalam menjalankan tugasnya sebagai pegawai pemerintah (van der Meer, 2020, hlm. 80).

Saat gajinya diturunkan karena krisis ekonomi, amtenar Bumiputra bersama dengan amtenar Eropa juga melakukan perlawanan dengan memprotes kebijakan itu. Mereka mulai melakukan protes pada tahun 1931 di Batavia. Amtenar yang berpartisipasi dalam protes itu diperkirakan mencapai 3.000 orang dan mendapatkan 175 telegram dukungan dari pegawai negeri lain yang berada di luar Batavia. Mereka menganggap pemotongan gaji yang dibebankan kepada mereka sebagai hal yang tidak adil. Apalagi mereka selama ini loyal dan membantu pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Mereka melaungkan pernyataan bahwa pemotongan gaji dapat merusak hubungan harmonis antara pemerintah dan amtenar (Emmer couran, 1931).

Satu tahun berikutnya, amtenar Bumiputra dan Eropa melakukan protes lagi. Namun kali ini jumlah massanya tidak sebanyak tahun sebelumnya, yakni sekitar 1.000 pegawai. Ini merupakan protes amtenar yang keempat. Mereka mengancam kebijakan pemerintah dan mengancam akan mengkonsolidasi kekuatan yang lebih besar (Soerabaijasch handelsblad, 1932).

Pemberontakan, perlawanan secara halus, dan protes terhadap penurunan gaji, merupakan berbagai langkah yang dilakukan untuk menolak kebijakan pemerintah kolonial yang dianggap merugikan posisi amtenar Bumiputra. Namun, perpindahan dari amtenar yang loyal menjadi penentang pemerintah tidak hanya menimpa para amtenar yang posisinya dirugikan tapi juga Bumiputra terdidik yang gagal mendapatkan pekerjaan saat krisis ekonomi berlangsung. Meskipun penduduk Bumiputra lebih berhasil memasuki sektor-sektor ekonomi yang ada daripada orang Eropa, penduduk Bumiputra masih banyak yang tidak mendapatkan pekerjaan sesuai kualifikasi mereka (Ingleson, 1988, hlm. 296; Suwignyo, 2013, hlm. 480).

Pendidikan Eropa yang menjauhkan siswa dari kehidupan agraris membuat penduduk Bumiputra yang terdidik tidak bersedia lagi untuk bekerja di sektor tersebut. Imajinasi mereka setelah lulus adalah bekerja pada sektor-sektor yang lebih prestisius, seperti pegawai pemerintah (De locomotief, 1911c). Namun lapangan kerja di sektor tersebut tidak tersedia karena terjadinya krisis ekonomi, sehingga terjadi ketidakselarasan apa yang ada di bayangan mereka dengan realitas lapangan pekerjaan (Sin Jit Po, 1930). Kekecewaan besar yang terjadi di kalangan pelajar Bumiputra ini kemudian mendorong mereka untuk terlibat dalam sektor swasta dan mulai ikut bersentuhan dengan politik dan gerakan nasionalisme (Suwignyo, 2013, hlm. 465).

HISTORIA: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah, p-issn:2620-4789 | e-issn:2615-7993

SIMPULAN

Pendidikan kolonial di Hindia Belanda pada awal abad ke-20 memainkan peranan penting dalam membentuk amtenar Bumiputra yang loyal dan mendukung status quo pemerintah kolonial. Hal tersebut karena sejatinya pendidikan kolonial tidak hanya dirancang untuk membentuk pelajar yang terampil tapi juga pelajar yang menginternalisasi nilai-nilai yang ditanamkan kepada mereka, patuh dan loyal itu sendiri.

Namun, muncul dua respons berbeda terhadap pendidikan kolonial ini. Satu, kelompok yang menerima posisi mereka dalam struktur kolonial dan berupaya mengejar stabilitas ekonomi melalui pekerjaan birokrasi. Sementara itu, kelompok lainnya, yang lebih kritis, mulai menyadari ketidakadilan yang mereka alami, seperti diskriminasi gaji dan ejekan rasial, sehingga beberapa dari mereka akhirnya berbalik arah, bahkan terlibat dalam gerakan perlawanan terhadap kolonialisme.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa pendidikan kolonial adalah alat ganda; di satu sisi menciptakan kesetiaan amtenar pada pemerintah kolonial, namun di sisi lain memicu resistensi dari kalangan yang sadar akan ketidakadilan struktural. Masih terdapat banyak kekurangan dalam penelitian ini. Penelitian ini cakupannya sangat luas sehingga lebih cocok dikatakan sebagai kajian pengantar. Setidaknya ada tiga topik penelitian lanjutan yang perlu untuk diteliti agar pemahaman terhadap hegemoni pendidikan menjadi lebih komprehensif. Pertama, mengenai bagaimana orang Bumiputra melakukan counter-hegemony di lingkup sekolah dalam kegiatan sehari-hari. Kedua, bagaimana bentuk hegemoni pendidikan itu terjadi dalam institusi pendidikan yang lebih spesifik. Ketiga, bagaimana pendidikan setelah Indonesia merdeka, apakah masih hegemonik atau tidak, apa yang berubah apa yang tetap.

REFERENSI

- Adinda Puspita Ningrum, Arnazaye, F. K., & Ricko Adi Wicaksana. (2023). Analisis faktor motivasi mahasiswa untuk menjadi pegawai pemerintah. *Jurnal Publik*, 17(2), 87–103. <https://doi.org/10.52434/jp.v17i02.190>.
- Algemeen Handelsblad, 1911a, Agustus 16.
- Algemeen Handelsblad, 1923, Maret 15.
- Anonim. (1918). *Geschiedkundige nota over een Indisch bezoldigingsstelsel*. Batavia—Landsdrukkerij.
- Anonim. (1932). *Richtlijnen voor een Indisch bezoldigingsstelsel*. Landsdrukkerij Batavia.
- Bella Astari Patta. (2023). *Ambtenaar bumiputera di kota makassar tahun 1906-1942 [Skripsi]*. Universitas Hasanuddin.

- Bataviaasch nieuwsblad, 1915, Mei 31.
- Bataviaasch nieuwsblad, 1921, Oktober 14.
- Came, H., Kerrigan, V., Gambrell, K., Simpson, T., & Goza, M. (t.t.). Unravelling colonial education: From dazzling white to deliberately decolonised and supporting the case for indigenous universities. *Whiteness and Education*, 0(0), 1–17. <https://doi.org/10.1080/23793406.2024.2376018>
- Christiaan Lambert Maria Penders. (1968). *Colonial education policy and practice in indonesia: 1900-1942*. Australian National University.
- Dawson, D. (1982). Educational hegemony and the phenomenology of community participation. *The Journal of Educational Thought (JET)*. *Revue de la Pensée Éducative*, 16(3), 150–160.
- De standaard. 1907, Agustus 14
- De locomotief, 1909, Agustus 28
- De locomotief, 1911c, Oktober 14.
- De Preanger-bode, 1912a, April 1.
- De nieuwe vorstenlanden, 1912b, April 10.
- De Preanger-bode, 1913, September 17.
- De nieuwe courant, 1914, Juli 8.
- De Indische courant, 1927, September 9.
- De Sumatra post, 1933, November 27.
- Djalins, U. (2013). Re-examining subject making in the netherlands east indies legal education: pedagogy, curriculum, and colonial state formation. *Itinerario*, 37(2), 121–146. <https://doi.org/10.1017/S0165115313000491>
- Djoened Poesponegoro, M., & Notosusanto, N. (Ed.). (2019). *Sejarah Nasional indonesia: zaman kebangkitan nasional dan masa hindia belanda* (7 ed.). Balai Pustaka.
- Djohan Makmur, Pius Suryo Haryono, Sukri Musa, & Hadi S. (1993). *Sejarah pendidikan di indonesia zaman penjajahan*. Manggala Bhakti.
- Emerson, R. (1946). Education in the netherlands east indies. *The Journal of Negro Education*, 15(3), 494–507. <https://doi.org/10.2307/2966115>.
- Emmer couran, 1931, April 10.
- Esa Susanti Putri. (2018). Perkembangan sekolah algemeene middelbare school (ams) di yogyakarta tahun 1919-1942. *Ilmu Sejarah - S1*, 3(7), Article 7.
- Fakhriansyah, M., & Patoni, I. R. P. (2019). Akses Pendidikan bagi pribumi pada periode etis (1901-1930). *Jurnal Pendidikan Sejarah*, 8(2), Article 2. <https://doi.org/10.21009/JPS.082.03>
- Frank, D. (2005). *Nasionalisme baru intelektual indonesia tahun 1920-an*. Gadjah Mada University Press.
- Giuseppe Vacca. (2021). *The concept of hegemony. Dalam Alternative Modernities: Antonio Gramsci's Twentieth Century*. Palgrave Macmillan.
- Gouda, F. (2007). *Dutch culture overseas: praktik kolonial di hindia belanda, 1900-1945* (S. Jugiarie & S. Riella Rusdiarti, Penerj.). Serambi.
- Hendri Saputra. (2024). *Suria kartalegawa, tokoh pribumi yang menolak keras kemerdekaan ri 1945, ini alasannya!* rakyatbengkulu.disway.id. <https://rakyatbengkulu.disway.id/read/690094/suria-kartalegawa-tokoh-pribumi-yang-menolak-keras-kemerdekaan-ri-1945-ini-alasannya>
- Herman, H. (2020). Kolonialisme, pendidikan, dan munculnya elit (minangkabau modern: sumatera barat abad ke-19). *Tarikhuna: Journal of History and History Education*, 2(2), Article 2.
- Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië, 1930a, Mei 26.
- Indah, W., Maskun, M., & M, S. (2013). Kebijakan pemerintah hindia belanda mengenai pendidikan bagi kaum bangsawan di indonesia tahun 1990-1920. *PESAGI (Jurnal Pendidikan Dan Penelitian Sejarah)*, 1(2), Article 2. <https://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/PES/article/view/476>
- Ingleson, J. (1988). Urban java during the depression. *Journal of Southeast Asian Studies*, 19(2), 292–309.
- Irfan Teguh Pribadi. (2019, Oktober 30). *Soeria kartalegawa, menak sunda di pusaran masa peralihan*. tirto.id. <https://tirto.id/soeria-kartalegawa-menak-sunda-di-pusaran-masa-peralihan-ef8a>
- Kartodirdjo, S. (2018). *Pengantar sejarah indonesia baru: sejarah pergerakan nasional dari kolonialisme sampai nasionalisme*. Ombak.
- Kolonial tijdschrift, 1919, Januari 1.
- Latif, Y. (2012). *Intelegensia muslim dan kuasa: genealogi intelegensia muslim indonesia abad ke-20*. Democracy Project.
- Legge, J. D. (1993). *Kaum intelektual dan perjuangan kemerdekaan: peranan kelompok sjahrir*. Pustaka Utama Grafiti.
- Lourdes Diaz Soto & Haroon Kharem. (2006). A Post-monoligual education. *International Journal of Educational Policy, Research, & Practice: Reconceptualizing Childhood Studies*, 7, 21–34.
- Marudut Bernadtua Simanjuntak. (2022). The moral value of the film “bumi manusia.” *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial*, 2(1), 100–107.
- Muhammad Rifa'i. (2020). *Sejarah pendidikan nasional: dari masa klasik hingga modern* (2 ed.). Ar-Ruzzmedia.
- Nasution. (2008). *Sejarah pendidikan indonesia* (3 ed.). PT Bumi Aksara.
- Nina H. Lubis. (1998). *Kehidupan kaum menak priangan 1800-1942*. Pusat Informasi Kebudayaan Sunda.

- Novriyanto, Y., Apriyana, S. B., & Komariyah, S. (2022). Pengaruh pengaruh kebijakan politik etis terhadap perkembangan pendidikan di indonesia: awal kebijakan politik etis terhadap pendidikan, sistem pendidikan di zaman belanda, lembaga pendidikan belanda. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.58540/jipsi.v1i1.17>
- Ricklefs, M. C. (2008). *A history of modern indonesia since c.1200 (4 ed.)*. Palgrave Macmillan.
- Rizqi Aunur Rahman. (2022). Nasionalisme dan Etnonasionalisme: Di antara Raden Tumenggung Ario (Mas) Sewaka dan Raden adipati aria moehammad moesa soeria kartalegawa pada tahun 1947 [Skripsi]. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Sbk, A. N. D. (2020). Studi historis sekolah kedokteran di indoensia abad xix. *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*, 10(2), Article 2. <https://doi.org/10.25273/ajsp.v10i2.6481>.
- Sin Jit Po, 1930b, Juli 11.
- Soerabaijasch handelsblad, 1932, Desember 29.
- Sumatra-bode, 1911b, September 23.
- Suratminto, L. (2013). Education policy in the colonial era. *Historia: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah*, 14(1), Article 1. <https://doi.org/10.17509/historia.v14i1.1923>
- Sutherland, H. (1983). *Terbentuknya sebuah elite birokrasi* (sunarto, penerj.). sinar Harapan.
- Suwignyo, A. (2013). The great depression and the changing trajectory of public education policy in indonesia, 1930–42. *Journal of Southeast Asian Studies*, 44(3), 465–489.
- Suwignyo, A. (2019). *Pendidikan, kekuasaan dan kolonialisme*. Selarung Institute.
- Thang, N. V., Phuc, N. H., Trong, D. V., Kiet, L. H., & Hiep, T. X. (2024). Another perspective in the education of netherlands in indonesia during colonial period (1799—1942). *Journal of Educational and Social Research*, 14(4), Article 4. <https://doi.org/10.36941/jesr-2024-0112>
- van der Meer, A. (2020). *Disrupting the colonial performance: dalam performing power* (hlm. 77–110). Cornell University Press; JSTOR. <http://www.jstor.org/stable/10.7591/j.ctv1hbf2dd.9>
- van Niel, R. (2009). *Munculnya elit modern indonesia*. Pustaka Jaya.
- Wibowo, A. S. (2018). Study of building typology of school constructed during the Dutch Colonial Period in Indonesia. Case study of Hoogere Burgerschool (HBS) in Bandung. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 126(1), 012077. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/126/1/012077>
- Yudi Agung Franata, Andi Zainal Abidin, & Kasful Anwar US, Sya'roni. (2024). Politik dan kebijakan pendidikan islam di indonesia. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 2(5), 284–296.